

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer, bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah semestinya memang dalam kenyataan semua orang berlomba dalam mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya, namun disisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan secara layak, baik dari tingkat dasar maupun tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, ada pula masyarakat yang memang pada awalnya dapat mengenyam pendidikan sampai pada tingkat dasar, namun akhirnya di tengah jalan karena terputus masalah sosial dan perekonomian terjadilah anak putus sekolah.

Pada hakikatnya bahwa pendidikan dapat membantu suatu keteraturan dalam masyarakat, peraturan yang telah dibuat, nilai yang telah ada di masyarakat akan dijalankan dengan baik sehingga tercipta suatu kehidupan yang selaras, seimbang, dan harmonis ketika setiap individu memahaminya, salah satu usaha agar hal itu terwujud adalah melalui pendidikan.

Pendidikan di daerah perkotaan sudah selayaknya mendapatkan akses yang nyaman, mudah, serta memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dari segi pelayanannya kepada masyarakat maupun dari segi manajemen di sekolahnya itu sendiri. Namun, sangat disayangkan apabila fenomena yang muncul saat ini bahwa masih saja ada kasus anak putus sekolah di daerah perkotaan, salah satunya di daerah Kota Bandung. Bandung adalah pusat kota yang terdapat di Jawa Barat kini keberadaannya sudah bersaing dengan Kota Jakarta maka tidak heran jika dijuluki sebagai kota metropolitan. Bandung merupakan kota terbesar jumlah penduduknya setelah Jakarta dan Surabaya, maka hal itu menyebabkan tingginya arus urbanisasi dan padatnya penduduk di kota Bandung.

Fenomena yang kita lihat pada saat ini sebenarnya tidak berbanding lurus dengan harapan yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional, karena dewasa ini masih banyak anak-anak di daerah perkotaan memilih putus sekolah atau dengan kata lain memilih untuk berhenti dan tidak menamatkan pendidikan di setiap jenjang terutama pada jenjang Sekolah Dasar. Sungguh sangat ironi ketika zaman

yang telah maju akan perkembangan sistem arus informasi dan teknologi tetapi negara kita masih bergelut dengan masalah-masalah pendidikan yang mendasar. Masalah ini dapat dilihat melalui kehidupan sehari-hari, masih banyaknya anak usia sekolah hidup di jalanan, mencari nafkah dengan cara yang tidak layak, anak-anak tersebut bergelut dengan dunia keras demi sesuap nasi.

Anak putus sekolah merupakan proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Hal tersebut berarti berhentinya seorang anak yang sedang mengenyam pendidikan karena berbagai faktor, salah satunya faktor ekonomi keluarga yang kurang sehingga membuat anak memutuskan untuk berhenti sekolah. Namun, di daerah perkotaan hal yang demikian tidak menjadi sumber utama seorang anak berhenti sekolah. Faktor keluarga dapat memicu anak untuk berhenti sekolah, seperti kondisi pekerjaan kedua orang tua yang tidak menetap membuat terpaksa anak harus ikut pindah mengikuti tempat orang tuanya bekerja. Hal tersebut memunculkan sikap malas pada anak, seorang anak cenderung bosan akibat kondisi orang tua yang berpindah-pindah tempat sehingga perhatian orang tua kepada anak dalam aspek pendidikan berkurang yang pada akhirnya terjadilah DO (*drop out*).

Fenomena putus sekolah bukanlah merupakan persoalan yang baru, tak hanya terjadi di desa namun pada masyarakat kota besar pun angka putus sekolah masih terbilang besar. Dalam hal ini, peneliti lebih berfokus pada faktor sosial ekonomi dan keluarga menjadi hal sangat penting yang memicu seorang anak untuk berhenti mengenyam pendidikan sekolah dasar.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari hasil wawancara bahwa di daerah Sukajadi Bandung terdapat anak putus sekolah yang kemudian sebagian dari mereka tak jarang untuk mengadu nasib di jalanan. Kondisi perekonomian keluarga dan daya pendidikan yang dimiliki oleh orang tua membuat anak dibiarkan untuk turun ke jalan dengan alasan membantu kebutuhan sehari-hari keluarga. Mahalnya pendidikan yang harus diakses pada masyarakat perkotaan membuat mereka para orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya dan memilih untuk tidak meneruskan anaknya bersekolah. Padahal, di usianya yang masih belia seorang anak wajib mendapatkan pendidikan. Selain latar belakang permasalahan ekonomi, anak mengalami DO (*drop out*) akibat faktor keluarga.

Kurangnya perhatian orang tua yang menyebabkan anak malas untuk pergi ke sekolah, serta kurangnya motivasi dari orang tua mengenai pentingnya pendidikan untuk anak. Hal tersebut dipicu dari sibuknya kedua orang tua dalam bekerja, orang tua tersebut siang dan malam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang tak dapat dipungkiri semakin tingginya harga kebutuhan pokok di masyarakat menjadikan orang tua banting setir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sanalah timbul masalah baru yakni kurangnya perhatian kepada anak karena orang tua lebih mementingkan pekerjaannya.

Harus kita ketahui bahwa sesungguhnya pendidikan merupakan salah satu institusi penting dalam proses perubahan pada suatu masyarakat. Masyarakat yang memiliki sistem pendidikan yang maju tentu saja dapat mempercepat perubahan sosial dalam masyarakat tersebut dan sebaliknya. Singkatnya bahwa pendidikan memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat.

Martono (2011, hlm.193) menegaskan bahwa

Pendidikan sebagai bagian dalam perubahan sosial pada dasarnya memiliki tugas untuk melakukan perubahan sosial dan transformasi menuju dunia yang lebih adil. Posisi ini disebabkan karena realitas atau kondisi masyarakat selalu berubah. Pendidikan mempunyai tugas agar individu mampu menghadapi perubahan sosial tersebut.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia. Menurut Martono (2011, hlm.195) menjelaskan juga bahwa “tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya”. Sanaky (dalam Martono, 2011, hlm.195) menegaskan bahwa “secara ekstrem dapat dikatakan bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat atau suatu bangsa ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut”. Pendidikan pada hakikatnya juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mengubah perilaku individu, tentu saja dalam hal ini adalah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Proses pendidikan itu

sendiri menurut Fiere (dalam Martono, 2011, hlm.196) bahwa “pendidikan dimaknai sebagai sebuah proses untuk membentuk manusia seutuhnya atau proses memanusiakan manusia”. Sedangkan menurut Dewey (dalam Martono, 2011, hlm.196) memberikan definisi bahwa “pendidikan secara luas sebagai organisasi pengalaman hidup serta pembentukan kembali pengalaman hidup”. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses perubahan dimana adanya perubahan pola tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik dari pengalaman hidup yang diperolehnya.

Posisi pendidikan sesungguhnya sangat strategis yakni erat kaitannya dengan fungsi *agent of change*. Pendidikan merupakan proses transfer ilmu juga sebagai proses penanaman nilai dan norma kepada individu. Pendidikan dapat dikatakan sebagai *agent of change* karena dapat mengubah pola pikir individu, menjadi pengalaman terbaik, serta melalui pendidikanlah masyarakat akan menjadi terbuka wawasannya dari hal tidak tahu menjadi tahu. Dari proses pendidikan seseorang pula dapat menaikkan status dan kedudukannya di masyarakat, maka pendidikan juga dapat dikatakan sebagai proses mobilitas sosial seseorang ke arah yang lebih baik.

Telah dijelaskan mengenai pendidikan di atas, namun sejauh ini bahwa pendidikan di Indonesia adalah hak bagi setiap warga negara dan hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan secara tegas bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Namun kita ketahui bersama ternyata keadaan di lapangan masih banyak anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak mulai dari jenjang Sekolah Dasar, bahkan tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah, maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai macam latar belakang terutama dari faktor lemahnya sosial ekonomi orang tua yang menyebabkan anak putus sekolah.

Kebijakan pemerintah tentang program Wajib Belajar 9 tahun didasari konsep “*pendidikan dasar untuk semua*” yang berarti penyediaan akses pendidikan yang sama harus didapatkan oleh semua anak. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu tingkat SD dan SMP. Melalui program Wajib

Belajar 9 tahun, diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki sebagai warga negara untuk bekal dalam hidup bermasyarakat.

Selain kebijakan tentang Wajib Belajar 9 tahun, pemerintah juga telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program ini untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 tahun. Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah, namun kasus anak putus sekolah masih saja tetap ada.

Nampaknya persoalan pendidikan perlu kita benahi bersama, tak hanya sebagai kajian dari pakar pendidikan semata atau tugas pemerintah saja, namun harus ada sinkronisasi antara pihak pemangku kepentingan dengan semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa kebijakan penting yang harus diambil agar bisa menyelesaikan sederet permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tersebut dalam penanganan anak putus sekolah, salah satunya adalah program Kelas Layanan Khusus (KLK), dengan adanya program Kelas Layanan Khusus (KLK) maka kesempatan anak putus sekolah untuk kembali mengakses pendidikan menjadi lebih mudah dan terbuka.

Terbatasnya penelitian yang mengkaji mengenai peranan Kelas Layanan Khusus (KLK) membuat bahasan mengenai penelitian terdahulu dalam penguatan skripsi ini tidak terlalu banyak. Penelitian terdahulu yang berhasil didapatkan peneliti melalui sumber jurnal online, yaitu sebagai berikut:

Jurnal penelitian disertasi oleh Alvian Chasanal Mubarroq (2009) yang berjudul Pemaknaan KLK (Kelas Layanan Khusus) di SDN Pegirian I Surabaya. Penelitian ini berfokus pada masalah pengentasan kembali anak putus sekolah, melalui program Kelas Layanan Khusus (KLK) yang khusus menangani anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sosial dengan perspektif interaksionisme simbolik. Pendekatan ini dipilih karena dinilai relevan dengan permasalahan yang hendak dijawab. Studi ini ingin memahami bagaimana program Kelas Layanan Khusus (KLK) dimaknai oleh orang tua yang belum

mampu dan anaknya telah putus sekolah. Penelitian ini menggunakan analisis dan metode dari Blumer sebagai salah satu tokoh interaksionisme simbolik. Hasil dari penelitian ini adalah orang tua siswa memaknai berbeda kehadiran Kelas Layanan Khusus (KLK).

Selanjutnya adalah jurnal penelitian disertasi oleh M.Shodiq, A.W (2009) dengan judul Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Model Kelas Layanan Khusus (Studi Multisitus di SDN Katalimo 10 Mekar dan SDN Tanjungan 5 Mekar). Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Katalimo 10 Mekar dan SDN Tanjungan 5 Mekar. Teknik analisa data, induktif deskriptif dengan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk data digunakan uji triangulasi. Penelitian berbentuk multisitus, maka ada dua analisis data yang digunakan yaitu analisis dalam situs dan analisis lintas situs.

Hasil dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan model Kelas Layanan Khusus (KLK) di kedua situs melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan perekrutan siswa. Pendekatan personal dan informal dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada seperti masalah motivasi siswa dan permasalahan ekonomi. Adapun untuk mengelola Kelas Layanan Khusus (KLK) dibutuhkan tenaga profesional yang dilakukan melalui perekrutan dan pelatihan serta diberikan kompensasi berupa materi dan non materi. Oleh sebab itu hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini bahwa penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana eksistensi program Kelas Layanan Khusus (KLK) yang ada di SDN Luginasari 2 Bandung.

Tingginya jumlah anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) yang putus sekolah di daerah perkotaan menjadi pertimbangan mendasar untuk menciptakan sebuah pelayanan pendidikan yang cocok bagi anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) tersebut. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran dari program Kelas Layanan Khusus (KLK) ini adalah SDN Luginasari 2 yang terletak di Jalan Komplek Polri Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Bandung. Program Kelas Layanan Khusus (KLK) itu sendiri pada awalnya terdapat di beberapa titik sekolah yang ada di kota Bandung, seperti SDN Caringin, SDN Cibaduyut, SDN Karang Taruna, SDN Warung Jambu, SDN Cisaranten Wetan, SDN Gegerkalong, SDN Gentra Masekdas, dan

SDN Luginasari 2. Hal tersebut disesuaikan dengan banyaknya sumber daya manusia yang meliputi anak wajib sekolah namun dalam segi sosial ekonomi mereka tidak mampu. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu beberapa sekolah dasar tersebut sudah tidak memberlakukan program Kelas Layanan Khusus (KLK) karena dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan ekonomi yang meningkat. Lain halnya dengan SDN Luginasari 2, di sekolah tersebut program Kelas Layanan Khusus (KLK) masih berjalan dikarenakan di sekitar sekolah tersebut taraf hidup masyarakat akan pentingnya pendidikan masih kurang bahkan SDN Luginasari 2 sepanjang program itu berjalan menjadi kiblatnya program Kelas Layanan Khusus (KLK) di kota Bandung.

Pada tahun 2008 SDN Luginasari 2 ditunjuk untuk menyelenggarakan Kelas Layanan Khusus (KLK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas Nomor 0106.1/023.03.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kelas Layanan Khusus (KLK), karena disekitar lingkungan SDN Luginasari 2 banyak anak-anak yang putus sekolah (DO) bahkan belum bersekolah walau usianya melebihi usia Sekolah Dasar. Berikut adalah gambar peta dari SDN Luginasari 2 Bandung:

Gambar 1.1

Peta SDN Luginasari 2 Bandung



Harni Marisa, 2016

EKSISTENSI PROGRAM KELAS LAYANAN KHUSUS (KLK) DALAM MEMBANTU TERCIPTANYA PENDIDIKAN ANAK PUTUS SEKOLAH DASAR DI SDN LUGINASARI 2 BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(Sumber: Google Maps, 2015)

Hal tersebut terjadi karena sebagian besar dari mereka adalah anak-anak jalanan yang diharuskan bekerja oleh orang tua mereka untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka tidak mampu untuk bersekolah. Sedangkan Undang-Undang Sisdiknas RI No.20 tahun 2003 pasal 32 ayat 2 tentang Pendidikan Layanan Khusus dinyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Dari tahun ke tahun program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 terus bertambah, hal tersebut dipicu oleh melonjaknya arus urbanisasi yang tinggi serta masyarakat sudah menaruh kepercayaan lebih terhadap SDN Luginasari 2 dalam hal pengelolaan dan proses pembelajarannya. Berikut adalah data peserta didik program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2.

Tabel 1.1
Jumlah Peserta Didik Kelas Layanan Khusus (KLK) SDN Luginasari 2

No	Nama	L/P	Umur
1	Riv	L	8 tahun
2	Sil	P	8 tahun
3	ZSJ	P	8 tahun
4	Riz	L	11 tahun
5	DMH	L	9 tahun
6	Ama	P	9 tahun
7	Naw	P	10 tahun
8	Ri	P	10 tahun
9	An	P	10 tahun
10	SS	L	9 tahun
11	HR	L	10 tahun
12	SA	L	10 tahun
13	HSN	L	10 tahun

Harni Marisa, 2016

EKSISTENSI PROGRAM KELAS LAYANAN KHUSUS (KLK) DALAM MEMBANTU TERCIPTANYA PENDIDIKAN ANAK PUTUS SEKOLAH DASAR DI SDN LUGINASARI 2 BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

14	CSS	L	9 tahun
15	Ar	L	9 tahun
16	Nov	L	9 tahun
17	KPP	L	9 tahun
18	SB	P	11 tahun
19	RN	L	12 tahun
20	Wij	L	12 tahun
21	Al	L	11 tahun
22	Yol	P	12 tahun

(Sumber: Hasil Penelitian, 2015)

Namun, walaupun sudah ada program Kelas Layanan Khusus (KLK) di sekolah tidak menutup kemungkinan orang tua mereka mau menyekolahkan kembali anaknya ke bangku pendidikan. Masalahnya adalah walaupun seluruh biaya pendidikan di Kelas Layanan Khusus (KLK) ditanggung pemerintah tetapi orang tua sulit untuk mendorong anak mereka kembali ke sekolah, karena saat anak putus sekolah maka mereka cenderung akan turun ke jalanan atau mereka akan membantu orang tua untuk bekerja. Sehingga masalah yang timbul semakin kompleks, mulai dari anak berhenti untuk mengenyam pendidikan dan lemahnya kontrol sosial dari orang tua karena ada sebagian anak yang diharuskan bekerja untuk membantu kondisi perekonomian keluarga. Selain dari faktor sosial dan ekonomi, perilaku anak yang cenderung malas belajar serta kondisi orang tua yang sering berpindah-pindah lokasi tempat tinggal menjadikan pendidikan anak terbengkalai. Mulai dari kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak cenderung bermalas-malasan dan kurang terciptanya suasana menyenangkan di lingkungan sekolah.

Penelitian ini berfokus pada masalah yang terjadi di dalam kegiatan program Kelas Layanan Khusus (KLK) yang khusus menangani anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya. Sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam program Kelas Layanan Khusus (KLK) yaitu peran kepala sekolah, guru, serta orang tua murid untuk memaknai hadirnya keberadaan program Kelas Layanan Khusus (KLK) tersebut.

Hadirnya program Kelas Layanan Khusus (KLK) membuat SDN Luginasari 2 ini menambah pekerjaan baru untuk guru yang mengajar pada kelas reguler, karena sejatinya anak yang belajar pada program Kelas Layanan Khusus (KLK) ini terpisah dengan kelas reguler. Guru harus mempunyai tenaga ekstra mengajar pada peserta didik program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2, karena pembelajaran pada program Kelas Layanan Khusus (KLK) mulai dari siang hari sampai sore hari. Selain itu, pendekatan dari guru terhadap murid yang masuk pada program Kelas Layanan Khusus (KLK) berbeda dengan murid yang ada di kelas reguler, terutama pendekatan terhadap anak yang mempunyai latar belakang anak jalanan. Guru harus mendekati anak dengan perlahan dan kemampuan sosial yang tinggi agar anak secara perlahan merasakan bahwa bersekolah itu sangat penting untuk kebutuhan masa depannya.

Dari paparan singkat di atas mengenai program Kelas Layanan Khusus (KLK) yang ada di SDN Luginasari 2 Bandung dirasa banyak memiliki masalah dalam menjalankan programnya. Terlebih dalam pengadaan program ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari lingkungan sekolah sampai lingkungan keluarga anak yang putus sekolah itu sendiri.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran persoalan yang dihadapi oleh adanya program Kelas Layanan Khusus (KLK) dalam mengupayakan mengentaskan anak putus sekolah yang ada di Kota Bandung kawasan Sukajadi dimana program Kelas Layanan Khusus (KLK) ini telah berlangsung pada salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Bandung yakni SDN Luginasari 2.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti dan ditinjau dari hasil observasi serta sumber literatur yang mendukung, maka peneliti mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu: “Bagaimana eksistensi program Kelas Layanan Khusus (KLK) dalam membantu terciptanya pendidikan anak putus sekolah dasar di SDN Luginasari 2 Bandung?”

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka peneliti jabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendidikan yang dilaksanakan oleh program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung?
2. Bagaimana kondisi peserta didik program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung?
3. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung keberlangsungan program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan proses pembelajaran program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi program Kelas Layanan Khusus (KLK) dalam membantu terciptanya pendidikan anak putus sekolah dasar di SDN Luginasari 2 Bandung.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai:

1. Bentuk pendidikan yang dilaksanakan oleh program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung.
2. Kondisi peserta didik program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung.
3. Peran orang tua dalam mendukung keberlangsungan program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2 Bandung.
4. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan proses pembelajaran program Kelas Layanan Khusus (KLK) yang dilaksanakan di SDN Luginasari 2 Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoretis hasil penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan dalam bidang Sosiologi khususnya cabang Sosiologi yakni Sosiologi Pendidikan dan Sosiologi Perubahan Sosial mengenai pentingnya pendidikan dan permasalahan dalam dunia pendidikan. Permasalahan tersebut salah satunya yang diakibatkan karena anak putus sekolah. Penelitian ini sebagai bentuk usaha memperbaiki sumber daya manusia.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan bidang Sosiologi maupun pedagogik, seperti:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang nyata bagaimana kelak nantinya berperan sebagai orang tua maupun pendidik bahwa betapa pentingnya memberikan pendidikan kepada anak dalam segi pengetahuan dan transfer nilai budi pekerti.
2. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi pemahaman mengenai masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dapat dikaji oleh Sosiologi Pendidikan dan Sosiologi Perubahan Sosial.
3. Bagi warga SDN Luginasari 2 dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan kualitas pengajaran kepada peserta didik.
4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam memahami dan memaknai arti pentingnya sebuah pendidikan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar skripsi ini dapat mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, skripsi ini disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka. Pada bab ini diuraikan berbagai definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.
- BAB III** : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan dan isu etik.
- BAB IV** : Temuan dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan pada program Kelas Layanan Khusus (KLK) di SDN Luginasari 2, mulai dari bentuk pendidikan, kondisi peserta didik, peran orang tua dan tenaga

pendidiknya. Setelah temuan di jabarkan, selanjutnya peneliti menjabarkan dalam pembahasan yang dikaitkan dengan teori yang telah di paparkan pada BAB II.

BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi. Implikasi yang dilakukan penulis berharap ada *follow up* dari pembuat skripsi dan rekomendasi untuk kedepannya atau saran untuk hasil penelitiannya agar bermanfaat untuk berbagai pihak yang terkait.